

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum, menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjunjung hukum dan pemerintahan tanpa ada kecuali, sehingga tidak ada kesenjangan antara satu masyarakat dengan masyarakat yang lainnya. Hal ini dinyatakan dengan tegas dalam penjelasan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwasannya “Negara Republik Indonesia berdasar atas hukum *“rechstaat”*, tidak berdasarkan hanya atas kekuasaan belaka. Konsep “Indonesia adalah negara hukum” mengandung arti bahwa di dalam hubungan antara hukum dengan kekuasaan, kekuasaan pasti tunduk pada hukum sebagai kunci demi kestabilan politik dalam masyarakat, dan jelas bahwa hukum adalah tiang utama dalam menggerakkan sendi-sendi dalam kehidupan bermasyarakat berbangsa serta bernegara.

Salah satu ciri-ciri utama dari suatu bentuk negara hukum ialah terletak pada kecenderungannya untuk menilai tindakan apa saja yang dilakukan oleh masyarakat atas dasar peraturan hukum yang ada. Pembahasan terkait hukum akan selalu berkaitan dengan masalah-masalah mengenai penegakan hukum (*law enforcement*) dalam pengertian yang luas dan juga merupakan penegakan keadilan. Apabila dikonkritkan lagi, maka akan tertuju pada aparat penegak hukum itu

sendiri, yaitu mereka yang pasti secara langsung terlibat dalam hal memperjuangkan penegakan hukum serta keadilan.

Aparat penegak hukum yaitu khususnya kepolisian mengemban tugas yang sangat luas, kompleks bahkan bisa dikatakan rumit. Kepolisian pun juga mempunyai posisi yang penting sebagai pelaksana penegak hukum, mereka berdiri paling depan dalam melaksanakan amanat undang-undang menegakan ketertiban, serta keamanan masyarakat. Sebagai aparat pelaksana ketentuan undang-undang, Polisi memiliki fungsi yang unikserta rumit karena pada saat menjalankan tugasnya tepat ditengah masyarakat.

Menurut Simons dalam bukunya *Learboek Nederlands Strafrecht*: “Polisi adalah ujung tombak dalam *integrated criminal justice system*. Di tangan polisi lah terlebih dahulu mampu mengurangi gelapnya kasus kejahatan.” dan dalam arti modern, Polisi adalah suatu pranata umum sipil yang mengatur tata tertib (orde) dan hukum. Polisi dalam lingkungan pengadilan bertugas sebagai penyidik, dalam tugasnya dia mencari keterangan-keterangan dari berbagai sumber dan keterangan saksi.

Secara menyeluruh polisi memiliki dua tugas, antara lain menegakkan hukum serta memelihara ketertiban umum. Tugas yang pertama mengandung pengertian represif atau mengandung tugas yang dibatasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang kedua yaitu mengandung preventif atau tugas untuk mengayomi adalah tugas luas tanpa ada batasan, boleh melakukan

apa saja asalkan keamanan terjaga dan tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku.

Merujuk pada Pasal 17 KUHAP tentang Penangkapan, “Perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup” dimana yang dimaksud ialah bukti permulaan untuk “menduga” adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi Pasal 1 butir 14 KUHAP.

Pada era globalisasi saat ini penyidik sudah harus meninggalkan cara-cara penyidikan yang terbelang konvensional yang hanya mengandalkan pengakuan dari tersangka maupun saksi semata, disebabkan rangkaian yang terbelang panjang dalam suatu proses peradilan pidana di Indonesia bermula dari sebuah proses yang disebut penyelidikan dan apabila hasil dari proses dilakukannya penyelidikan tersebut penyidik bisa menyimpulkan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana (*delict*), maka status kasus tersebut ditingkatkan pada tahap penyidikan yang ditujukan untuk mencari bukti dan menemukan terangkanya. Setelah itu, apabila penyidik telah dapat menemukan bukti permulaan yang dianggap cukup dan dapat mengarah kepada seseorang sebagai terangkanya, maka dapat dilakukan penangkapan terhadap tersangka tersebut, hal ini dapat menyebabkan terjadinya potensi kesalahan penangkapan / salah tangkap (*error in persona*) pada suatu kasus apalagi suatu kasus yang pelakunya lebih dari satu orang.

Suatu hal yang seharusnya diperbaharui atau menjadi suatu terobosan dari cara dilakukannya penyidikan yaitu cara penyidikan harus segera berpindah dengan menggunakan metode *Scientific Crime Investigation* (penyidikan secara Ilmiah). Hal diatas selaras dengan visi dan misi yang dianut Polri dalam Pasal 14 Ayat (1) UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dimana hal ini mewajibkan Polri melakukan identifikasi, psikologi dan laboratorium forensik kepada tugas kepolisian, penjabarannya dengan melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) melalui cara ilmiah untuk mengungkapkan suatu kasus pidana. Disertai dengan adanya tuntutan kepada masyarakat nasional maupun internasional bahwa dalam proses penyidikan harus selalu menjunjung kekuasaan tertinggi hukum dan HAM serta tuntutan dari perundang-undangan (KUHP) yang sekarang tidak lagi mengejar pengakuan dari sistem pembuktian, demi terciptanya kepastian hukum serta rasa keadilan sehingga dapat meningkatkan kesadaran dalam masyarakat untuk dapat patuh kepada aturan-aturan hukum.

Penganiayaan merupakan suatu kata sifat yang berasal dari kata dasar "aniaya" yang berawalan "pe" dan berakhiran "an", sedangkan arti penganiaya sendiri berasal dari kata benda yang berasal dari kata aniaya yang menunjukkan pelaku atau subyek penganiayaan. Penganiayaan merupakan perlakuan sewenang-wenang (penindasan, penyiksaan dan sebagainya)

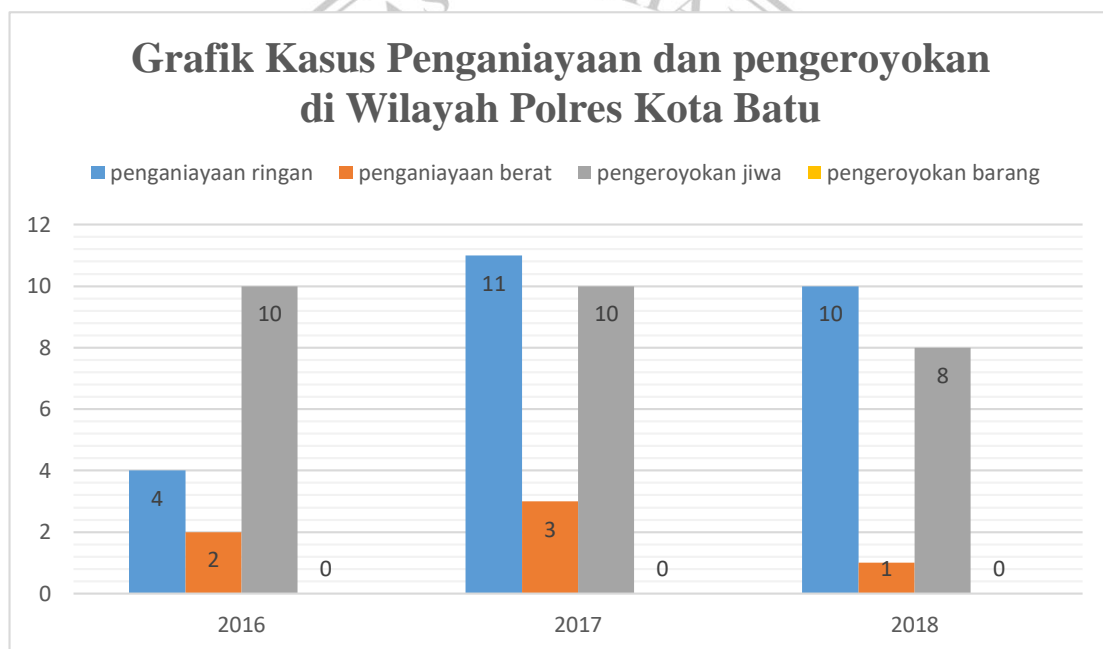
Masalah kejahatan merupakan masalah yang selalu meresahkan masyarakat karena terus berlanjut sesuai dengan perkembangan tingkat peradaban manusia itu

sendiri dan penanggulangannya sampai saat ini belum dapat ditangani dengan baik. sehingga mau tidak mau kita harus dapat mengatasinya. Banyak dana dan tenaga telah dikeluarkan untuk menanggulangi masalah kejahatan, tetapi hasilnya belum juga memuaskan. Bahkan jumlah kejahatan di beberapa tempat justru semakin meningkat baik modus maupun kuantitasnya.

Semakin maraknya terjadinya “kejahatan” di Masyarakat menimbulkan keresahan tersendiri untuk Masyarakat hal ini dapat terbukti dari dimasukkannya kejahatan dengan kekerasan dalam KUHP, KUHP-pun bertujuan memberikan perlindungan secara preventif pada “jiwa” dan “badan”, paling tidak melalui ancaman hukumannya yang lebih tinggi dibandingkan dengan tindak pidana lainnya. Demikian pula berita tentang pembunuhan, penganiayaan berat, dan pengerojukan di media masa mendapat perhatian yang khusus dari pembacanya. Terutama bilamana yang menjadi “berita” adalah kasus-kasus yang bersifat khusus, baik karena caranya (modus), pelaku (tersangka) atau korbannya, maupun hubungan yang diperkirakan ada antara pelaku dan korban.

Kasus seperti ini pernah terjadi pada tahun 2015, hari Minggu malam tanggal 18 bulan Januari di wilayah taman makam pahlawan kota Batu dimana korban berinisial DP (28) ditemukan dalam keadaan tewas dikeroyok oleh 10 orang pemuda yang diketahui, para pemuda tersebut secara tidak sengaja bertemu dengan korban DP dan temannya pada malam kejadian tersebut, karena ada perselisihan, sempat terjadi adu mulut antara korban DP dengan segerombolan pelaku, korban

DP lalu dikeroyok, lalu dipukul dengan menggunakan kayu dan batu sehingga menyebabkan korban tidak bisa melindungi diri dan nyawanya tidak dapat terselamatkan, berdasarkan penelitian lapang yang telah ditinjau oleh penulis dari tahun ketahun kasus seperti ini kian marak terjadi belakangan ini, dimana pelaku kejahatan dengan jumlah lebih dari satu orang dengan beringasnya merusak bahkan menghabisi nyawa korbannya.



Sumber : Admin Urmin Satreskrim Polres Kota Batu

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa dalam kurun waktu 3 tahun belakangan tingkat penganiayaan dan pengeroyokoan terutama penganiayaan ringan dan pengeroyokan jiwa mengalami peningkatan tergolong cenderung tetap dan hanya sedikit terjadi penurunan dan juga tidak jarang terdapat kasus yang masih

dalam status “lidik” atau belum terselesaikan serta terdapat 5 (lima) kasus yang mengandung error in persona, maka dalam hal ini perlu diketahui langkah-langkah atau strategi tepat yang semestinya perlu dilakukan oleh pihak penyidik untuk memecahkan dan menekan tingkat kejahatan guna penanganan masalah tersebut, cara penentuan hukum, cara menghindari terjadinya kesalahan-kesalahan terutama dalam terjadinya hal salah tangkap atau *error in persona* jika dalam suatu kasus terdapat beberapa pelaku dengan tingkat kejahatan yang berbeda-beda.

Menurut para ahli, perbuatan yang mengakibatkan terjadinya kerusakan baik fisik maupun psikis seseorang yang diancam dengan sanksi dalam KUHP adalah perbuatan kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Dengan pola pikir yang demikian maka pengertian istilah kekerasan atau “*violence*” menunjuk kepada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang, termasuk di dalamnya adalah perbuatan mengancam kerusakan pada harta benda atau fisik termasuk pula mengakibatkan kematian pada seseorang.¹

Dilihat dari perspektif hukum pidana, berbagai bentuk kekerasan menunjuk pada tingkah laku yang berbeda-beda, baik mengenai motif maupun mengenai tindakannya, seperti contohnya antar perbuatan pengeroyokan dengan perbuatan pembunuhan, kedua jenis perbuatan ini diikuti dengan kekerasan.

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 1997, hlm. 193.

Kejahatan semacam ini meliputi penganiayaan berat, pencurian dengan kekerasan, pembunuhan, perkosaan, penjangbretan, penodongan, pembajakan, dan pemerasan. Kejahatan yang disertai dengan kekerasan ini sangat meresahkan masyarakat dan dikhawatirkan akan terus meningkat baik kualitas maupun kuantitasnya. Kejahatan dengan kekerasan terhadap orang lain seringkali merupakan lanjutan dari aksi kejahatan sebelumnya seperti pencurian, penganiayaan, pengeroyokan, perkosaan dan lain-lain. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kejahatan yang bersifat kejam dan brutal akan berkembang sejalan dengan perkembangan kejahatan kekerasan pada umumnya.

Akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan kematian seseorang di Masyarakat sehingga menimbulkan keresahan tersendiri bagi Masyarakat contohnya seperti yang terjadi di Kota Batu mengenai Pengeroyokan yang menimbulkan kematian pada seseorang, namun apakah undang-undang yang berlaku dan langkah-langkah yang diambil oleh para penyidik sudah cukup efektif dalam hal menuntaskan sebuah kasus maupun dalam menjatuhkan pidana yang sesuai dengan kejahatan yang dilakukan para pelaku pengeroyokan yang dimana pelakunya lebih dari 1 orang dengan tingkat kejahatan yang berbeda-beda.

Berdasarkan penjelasan diatas, penulis memiliki ketertarikan untuk meneliti tentang **STRATEGI PENYIDIK KEPOLISIAN DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN DENGAN Pengeroyokan (Studi di Polres Kota Batu)**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan dari berbagai permasalahan diatas, penulis dapat merumuskan beberapa permasalahan penelitian yang diangkat, sebagai berikut :

1. Apa strategi yang digunakan penyidik polisi guna melakukan penyidikan suatu kasus penganiayaan yang dilakukan lebih dari satu orang?
2. Bagaimanakah cara penyidik polisi mencegah terjadinya salah tangkap atau *error in persona*?

C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, penulis mempunyai beberapa tujuan yaitu :

1. Untuk mengetahui strategi yang digunakan penyidik polisi guna melakukan penyidikan suatu kasus penganiayaan yang dilakukan lebih dari satu orang.
2. Untuk mengetahui cara yang dilakukan penyidik polisi mencegah terjadinya salah tangkap atau *error in persona*.

D. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Penulis

Sebagai salah satu cara guna menambah ilmu pengetahuan atau wawasan terutama dalam permasalahan yang telah diteiliti dan sebagai syarat untuk menyelesaikan studi S1 di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang.

2. Bagi Aparatur Negara

Untuk dapat mengetahui solusi yang dapat diterapkan dalam proses pembuktian guna mengungkap suatu kasus Tindak Pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian yang kerap masih banyak terjadi di masyarakat, sehingga dapat berguna sebagai bahan pertimbangan terutama bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam suatu proses pembuktian suatu kasus tindak pidana jika didalamnya terdapat perkara yang sama dilain waktu.

3. Bagi Kalangan Akademisi

Untuk dapat digunakan sebagai tambahan wawasan bagi kalangan akademisi dalam hal menambah pengetahuan terkait penerapan hukum tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian oleh Polresta Kota Batu.

E. Metode Penelitian

Metode merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi dikarenakan dalam suatu penelitian bertujuan untuk

mengungkap kebenaran secara metodologis, sistematis serta konsisten dengan melakukan analisis.² sedangkan penelitian itu sendiri adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mencari, mencatat, merumuskan dan menganalisis suatu hal sampai menyusun laporannya.³

1. Metode Pendekatan

Didalam penelitian yang dilakukan oleh penulis yaitu lebih menitik beratkan kepada studi terhadap fenomena hukum yang telah terjadi di masyarakat. Uraian serta masalah akan ditelusuri dengan menggunakan pendekatan Yuridis Sosiologis. Yuridis yaitu pendekatan dari aspek hukum positif yaitu Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Pasal 7 ayat 1 Kitab Undang-undang hukum acara pidana tentang wewenang penyidik..

Sedangkan sosiologis merupakan pendekatan dengan melihat kejadian atau kenyataan pada masyarakat.⁴ Kejadian atau kenyataan pada masyarakat dalam penelitian ini yaitu mengenai usaha pembuktian yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dalam mengungkap suatu tindak pidana Penganiayaan sesuai Undang-Undang yang ada.

² Soerjono soekanto dan Sri Mamudji. 1985. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. CV Rajawali. Jakarta. hlm : 1.

³ Dalam Soekanto Sardjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet III. UI Press. Jakarta. hlm : 3.

⁴ Muslan Abdurrahman, 2009, *Sosiologi Dan Metode Penelitian Hukum*. Malang. UMM Press. Hal:103

Maka pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menitik beratkan pada aturan hukum (*Das Sollen*) dan dipadukan dengan menelaah fakta-fakta sosial (*Das Sein*) yang terkait dalam penelitian.⁵

2. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan berkaitan dengan pembahasan dari penelitian ini, maka penulis melakukan penelitian lapangan di wilayah hukum Polres kota Batu.

3. Jenis Data

Dalam sebuah penelitian dan merupakan hal penting yang diperuntukkan sebagai bahan kajian khususnya dalam kajian hukum, data atau sumber hukum primer dan sekunder yang digunakan dalam proses analisis secara yuridis sosiologis.

Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder.⁶

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang akan diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian yaitu wilayah hukum Polres kota Batu mengenai masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan, melalui wawancara dengan narasumber yaitu Satreskrim Polres Kota Batu, yang dianggap memiliki keterkaitan dan

⁵ Bambang Waluyo, 1991, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika. Hal: 17

⁶ Soekanto Sardjono & Sri Maudji. 2001. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu tinjauan singkat*. PT Raja Grafindo Persada. Jakarta. Hl. 14.

kompetensi dengan permasalahan yang ada. Data dalam penelitian ini yaitu data yang berkaitan dengan tentang penyidikan dalam mengungkap suatu tindak pidana penganiayaan yang menyebabkan kematian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data pendukung dari data primer. Data sekunder diperoleh dari kajian kepustakaan dan undang-undangan, buku-buku literature maupun hasil penelitian terdahulu sebagai acuan tambahan bagi penulis. Sumber data yang terkait antara lain :

- 1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁷
- 2) Perkab Polri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana

c. Data Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang diperoleh dari ensiklopedia, jurnal hukum, kamus hukum dan kamus besar bahasa Indonesia. Penulis menggunakan bahan hukum tersier sebagai bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder.

⁷ R. Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHAP dilengkapi yurisprudensi MA dan Hoge Raad*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm.218-219.

4. Teknik Pengumpulan Data Penelitian

Teknik pengumpulan data dilakukan penulis melalui :

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode bertatap muka dengan responden untuk menanyakan fakta-fakta yang ada, pendapat maupun persepsi dari responden pelaku, diantaranya adalah pejabat yang berwenang dalam hal ini Bapak Faris Tyas Fajar, S.H selaku Ba. Satreskrim.

b. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah dengan melakukan pencarian atau penelusuran bahan-bahan kepustakaan seperti berbagai literature atau buku-buku atau jurnal.

c. Studi Website atau penelusuran Internet

Penelusuran penulis dengan menggunakan jaringan internet untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan penelitian.

5. Teknik Analisa Data

Setelah melakukan teknik pengumpulan data penelitian baik wawancara, studi kepustakaan, maupun penelusuran internet telah dirasa cukup, maka penulis menggunakan metode Deskriptif Analitif yaitu mendiskripsikan dengan cara menggambarkan kejadian kemudian dianalisa menggunakan Deskriptif Kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode untuk menyelidiki obyek yang tidak dapat diukur dengan angka-angka ataupun ukuran lain yang bersifat eksak.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan penulisan hukum ini, penulis membagi dalam 4 bab dan masing-masing bab terdiri atas sub bab yang bertujuan agar mempermudah pemahamannya. Adapun sistematika penulisannya sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat didalamnya 7 sub bab. Yaitu latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan, kegunaan penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini berisi deskripsi atau uraian tentang bahan-bahan teori, doktrin, atau pendapat sarjana, dan kajian yuridis berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, kajian terdahulu terkait topik atau tema yang diteliti.

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pembahasan yang telah dikaji dan dianalisa secara sistematis berdasarkan pada kajian pustaka sebagaimana dalam Bab II.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bab akhir dalam penulisan hukum dimana berisi tentang kesimpulan dan saran penulis terkait dengan permasalahan yang diangkat.